


Nahdlatul Ulama sebagai Aktor Keagamaan dalam Resolusi Konflik Sosial Perspektif Perdamaian Global


 **Abdul Chamid**

Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

 Acac22520@gmail.com

 **Nuriya Hamida**

Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

 Nuriyahamida7@gmail.com

*Korespondensi: Acac22520@gmail.com

Informasi Artikel

Dikirim: 01 April 2026
Revisi: 23 Mei 2026
Diterima: 29 Juni 2026
Terbit: 31 Juni 2026

Kata kunci:

Nahdlatul Ulama;
conflict resolution;
global peacebuilding;
Islamic soft power;
wasatiyyah; religious
civil society

Abstrak

This research aims to analyze and synthesize literature related to the role of Nahdlatul Ulama (NU) as a religious actor in the resolution of social conflicts from the perspective of global peace. This study uses a systematic literature review (SLR) approach with the adaptation of the PRISMA protocol. The results of the synthesis identify four central themes: first, the value of wasatiyyah (Islamic moderation) as an ideological foundation that is operationalized in conflict resolution practice; second, the role of NU as a multi-level mediator in communal conflicts in Indonesia; third, the transformation of NU into a global peacebuilding actor through the consolidation of the international network of moderate clerics; and fourth, the projection of NU's religious soft power in global peace governance. This study proposes a new concept of autonomous religious soft power to explain the unique capacity of moderate Islamic organizations to influence the dynamics of international peace without relying on state apparatus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis literatur yang berkaitan dengan peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai aktor keagamaan dalam resolusi konflik sosial dari perspektif perdamaian global. Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) dengan adaptasi protokol PRISMA. Kriteria inklusi penelitian mencakup publikasi ilmiah periode 1990–2024. Hasil sintesis mengidentifikasi empat tema sentral: pertama, nilai *wasatiyyah* (moderasi Islam) sebagai fondasi ideologis yang dioperasionalkan dalam praktik resolusi konflik; kedua, peran NU sebagai mediator multi-level dalam konflik komunal di Indonesia; ketiga, transformasi NU menjadi aktor *peacebuilding* global melalui konsolidasi jaringan ulama moderat internasional; dan keempat, proyeksi *religious soft power* NU dalam tata kelola perdamaian global. Kajian ini mengusulkan konsep baru *autonomous religious soft power* untuk menjelaskan kapasitas unik organisasi Islam moderat dalam mempengaruhi dinamika perdamaian internasional tanpa bergantung pada aparatur negara. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan *Islamic social thought*, teori *civil society* berbasis agama, dan studi resolusi konflik dalam perspektif global.

PENDAHULUAN

Perkembangan konflik sosial pada abad ke-21 bersifat multidimensional dan melampaui analisis ekonomi-politik konvensional. Data dari *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP) dan *Peace Research Institute Oslo* (PRIO) secara konsisten menunjukkan bahwa faktor keagamaan berperan signifikan dalam eskalasi maupun de-eskalasi berbagai konflik bersenjata dan kekerasan komunal di seluruh penjuru dunia.¹ Agama menempati posisi paradoksal: ia dapat berfungsi sebagai akar intoleransi dan kekerasan, sekaligus sebagai sumber daya moral paling potensial bagi rekonsiliasi dan perdamaian. Appleby (2000) merumuskan paradoks ini sebagai *ambivalence of the sacred*, yakni potensi ganda agama yang bersifat destruktif sekaligus konstruktif.² Dalam diskursus yang berkembang ini, pertanyaan sentral bukan lagi apakah agama berperan dalam konflik dan perdamaian, melainkan bagaimana, kapan, dan melalui aktor mana agama dapat difungsikan secara efektif sebagai instrumen resolusi konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan sebuah pertanyaan yang menjadi inti kajian ini.

Nahdlatul Ulama (NU), yang secara harfiah berarti Kebangkitan Ulama, didirikan pada tahun 1926 dan kini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dengan keanggotaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 90 juta orang.³ Secara teologis, NU berpegang pada prinsip-prinsip Islam ahlussunnah wal jama'ah yang menekankan moderasi (*wasatiyyah*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan ('adalah) sebagai landasan etis dalam berinteraksi lintas batas agama dan budaya.⁴ Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat doktrinal, melainkan terinternalisasi dalam jaringan pesantren, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan NU yang membentang di seluruh kepulauan Indonesia menjadikan NU sebagai *civil society* yang memiliki kapasitas substantif dalam membentuk wacana sosial-politik dan memfasilitasi resolusi konflik di berbagai tingkatan. Kapasitas kelembagaan inilah yang kemudian mendorong transformasi NU: dari aktor mediasi konflik komunal berbasis identitas di wilayah Maluku, Poso, dan berbagai daerah pada awal era

¹ Daniel Philpott, "Explaining the Political Ambivalence of Religion," *The American Political Science Review* 101, no. 3 (March 31, 2007): 505–25, <http://www.jstor.org/stable/27644463>.

² S R Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*, Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict Series: Religion, International Studies (Bloomsbury Academic, 2000), <https://books.google.co.id/books?id=8RqbMGvsz5MC>.

³ Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Search for a Modern Islamic Civilization* (Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2009).

⁴ G Fealy and G Barton, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, Monash Papers on Southeast Asia (Monash Asia Institute, 1996), <https://books.google.co.id/books?id=eYSOAAAAMAAJ>.

reformasi,⁵ menuju aktor global yang mempromosikan model Islam moderat melalui inisiatif seperti International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) dan berbagai forum multilateral internasional.⁶ Transformasi ini bukan sekadar perluasan geografis, melainkan cerminan dari meningkatnya relevansi pendekatan NU dalam menghadapi tantangan radikalisme global dan merespons kebutuhan akan aktor keagamaan non-negara yang konstruktif dalam arsitektur perdamaian dunia.

Meskipun literatur tentang agama dan peacebuilding telah berkembang secara substansial didukung oleh karya-karya pionir seperti Lederach (1997),⁷ Appleby (2000), Johnston dan Sampson (1995),⁸ serta Helmick dan Petersen (2001) terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam kajian yang ada. Pertama, sebagian besar studi yang membahas peran agama dalam resolusi konflik masih didominasi perspektif Barat dan kasus-kasus berbasis tradisi Kristen atau konflik di Afrika dan Timur Tengah, sementara kontribusi organisasi Islam moderat di Asia Tenggara khususnya dalam konteks demokrasi yang plural masih relatif kurang mendapat perhatian akademik yang memadai. Kedua, kajian yang secara eksplisit menganalisis NU sebagai aktor peacebuilding dari perspektif perdamaian global masih sangat terbatas, dan sebagian besar yang ada bersifat deskriptif-historis daripada analitis-teoritis. Ketiga, dan ini merupakan kebaruan utama penelitian ini, belum ada upaya sistematis yang mensintesis berbagai literatur tersebar tentang peran NU ke dalam satu kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori peacebuilding transformatif (Lederach; Galtung),⁹ konsep religious soft power (Nye, 2004), serta teori civil society (Habermas, 1996)¹⁰ secara berperspektif internasional. Inilah yang membedakan penelitian ini secara substansial dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya berfokus pada satu kerangka teori tunggal atau satu konteks konflik tertentu.

⁵ Badrus Sholeh, "Resolusi Konflik Di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia," *IAIN Tulungagung Research Collections* 12, no. 1 (2017): 29–52.

⁶ M Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*, Book Collections on Project MUSE (Institute of Southeast Asian Studies, 2009), https://books.google.co.id/books?id=_88w9S28ZkUC.

⁷ J P Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (United States Institute of Peace Press, 1997), <https://books.google.co.id/books?id=54G6tlumdT0C>.

⁸ D Johnston and C Sampson, *Religion, the Missing Dimension of Statecraft* (Oxford University Press, 1995), <https://books.google.co.id/books?id=o7TAsFMSgEMC>.

⁹ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (September 1, 1969): 167–91, <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.

¹⁰ Krisnaldo Triguswinri, "Diskursus Ruang Publik Habermasian Dan Kebijakan Publik: Studi Literatur," *Pembangunan Dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro* 7, no. 1 (2023): 637–42.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mensintesis literatur yang relevan terkait peran Nahdlatul Ulama sebagai aktor keagamaan dalam resolusi konflik sosial dari perspektif perdamaian global. Secara operasional, kajian ini diarahkan pada tiga sasaran: pertama, memetakan berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris tentang hubungan antara NU, resolusi konflik, dan peacebuilding; kedua, menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam moderat yang menjadi landasan NU diterjemahkan ke dalam praktik-praktik konkret resolusi konflik di berbagai konteks; dan ketiga, merumuskan kerangka konseptual integratif yang dapat menjelaskan kontribusi NU dalam perspektif perdamaian global serta implikasinya bagi pengembangan Islamic social thought dan studi resolusi konflik yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi lacuna intelektual yang telah diidentifikasi dan memberikan sumbangan perspektif non-Barat yang selama ini masih kurang terwakili dalam diskursus perdamaian internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber akademik primer dan sekunder yang relevan. SLR dipilih bukan sekadar sebagai teknik pengumpulan pustaka, melainkan sebagai desain penelitian yang berdiri sendiri dengan prosedur yang ketat, transparan, dan dapat direplikasi.¹¹ Berbeda dengan narrative review yang mengandalkan seleksi sumber secara subjektif dan rentan terhadap bias konfirmasi, SLR mengharuskan peneliti menetapkan protokol pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, dan prosedur penilaian kualitas secara eksplisit sebelum proses pengumpulan data dimulai sehingga setiap keputusan metodologis dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keunggulan SLR dibandingkan pendekatan kajian literatur konvensional terletak pada tiga aspek fundamental. Pertama, dari segi cakupan, SLR memastikan bahwa seluruh literatur yang relevan dalam basis data yang ditetapkan terjaring secara sistematis, bukan hanya sumber-sumber yang akrab bagi peneliti atau yang mudah diakses. Kedua, dari segi transparansi, protokol SLR mendokumentasikan secara rinci setiap tahap seleksi sehingga peneliti lain dapat mereplikasi atau memperbarui kajian ini seiring bertambahnya publikasi baru sebuah standar yang tidak dapat dipenuhi oleh narrative review.¹² Ketiga, dari segi reliabilitas, dengan menggunakan kriteria penilaian kualitas yang

¹¹ M Petticrew and H Roberts, *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide* (Wiley, 2008), https://books.google.co.id/books?id=ZwZ1_xU3E80C.

¹² Arlene Fink, *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*, 5th ed (SAGE Publications, 2019).

terstandar, SLR meminimalkan risiko sumber bermutu rendah atau bias ideologis memasuki corpus analisis, yang pada gilirannya meningkatkan validitas kesimpulan yang dihasilkan. Relevansi pendekatan ini untuk kajian peran NU dalam peacebuilding global semakin kuat mengingat literatur tentang topik ini tersebar di berbagai disiplin studi Islam, hubungan internasional, sosiologi konflik, dan studi kawasan sehingga diperlukan metode yang mampu mengintegrasikan body of knowledge yang terfragmentasi tersebut secara sistematis dan kritis.

Kerangka metodologis yang digunakan mengadaptasi panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang telah diadaptasi untuk keperluan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.¹³ Penggunaan PRISMA dalam penelitian ini memiliki dasar argumentatif yang kuat. Secara historis, PRISMA dikembangkan untuk mengatasi persoalan pelaporan yang tidak konsisten dan tidak lengkap dalam systematic reviews persoalan yang sama-sama relevan baik dalam ilmu kesehatan maupun ilmu sosial. Dalam konteks kajian ini, PRISMA berfungsi sebagai kerangka akuntabilitas: setiap tahap dari identifikasi sumber hingga inklusi final didokumentasikan dengan diagram alur yang memungkinkan pembaca menilai kecermatan dan objektivitas proses penelitian.

Lebih jauh, adaptasi PRISMA untuk ilmu sosial yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan karakteristik spesifik literatur tentang organisasi keagamaan dan resolusi konflik, yang sering kali tidak berformat artikel empiris kuantitatif sebagaimana lazim dalam ilmu kesehatan. Oleh karena itu, protokol ini dimodifikasi untuk mengakomodasi sumber-sumber berupa buku akademik, book chapter, dan laporan lembaga riset jenis publikasi yang justru mendominasi studi tentang NU dan peacebuilding tanpa mengorbankan standar seleksi yang ketat. Justifikasi ini sejalan dengan rekomendasi Petticrew dan Roberts (2008) bahwa protokol SLR dalam ilmu sosial harus responsif terhadap ekologi literatur bidang yang dikaji.¹⁴

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui enam basis data akademik internasional bereputasi tinggi: (1) Scopus, (2) Web of Science (WoS), (3) Google Scholar, (4) JSTOR, (5) Taylor & Francis Online, dan (6) ProQuest Dissertations & Theses. Cakupan pencarian juga diperluas ke jurnal-jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan SINTA 2 yang relevan, mengingat sebagian signifikan literatur tentang NU tersedia dalam bahasa Indonesia. Strategi multi-database ini diterapkan untuk memaksimalkan cakupan literatur sekaligus

¹³ David Moher et al., "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses: The PRISMA Statement," *Open Medicine: A Peer-Reviewed, Independent, Open-Access Journal* 3, no. 2 (July 21, 2009): 123–30, <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005>.

¹⁴ Petticrew and Roberts, *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*.

meminimalkan publication bias yang dapat muncul apabila hanya mengandalkan satu basis data.

Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Inggris dan Indonesia, mencakup: "Nahdlatul Ulama", "NU peacebuilding", "Islamic civil society conflict resolution", "moderate Islam Indonesia", "wasatiyyah global peace", "religious soft power Southeast Asia", dan "Islam social organization conflict", beserta berbagai kombinasi Boolean (AND/OR) dari term-term tersebut. Pencarian dibatasi pada publikasi tahun 1990–2024, sebuah rentang yang dipilih secara substantif karena periode ini mencakup fase transformasi signifikan NU dari organisasi nasional berbasis pesantren menjadi aktor global peacebuilding sehingga memungkinkan penelusuran perkembangan peran NU secara longitudinal.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Dimensi	Kriteria	Keterangan
Inklusi – Topik	Relevansi tematik	Studi yang membahas NU, Islam moderat Indonesia, civil society keagamaan, resolusi konflik, dan/atau peacebuilding
Inklusi – Bahasa	Bahasa publikasi	Bahasa Indonesia dan Inggris
Inklusi – Periode	Rentang waktu	Publikasi tahun 1990–2024
Inklusi – Jenis Publikasi	Format sumber	Artikel jurnal peer-reviewed, buku akademik, book chapter, disertasi/tesis, dan laporan lembaga riset bereputasi
Eksklusi	Sumber yang disingkirkan	Opini non-akademik, artikel populer tanpa referensi, studi yang tidak relevan dengan tema resolusi konflik atau peran keagamaan NU

Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

Proses seleksi literatur dilakukan dalam empat tahap berurutan yang mengikuti alur PRISMA. Tahap pertama, identifikasi awal (identification), menghasilkan total 487 sumber potensial dari seluruh basis data yang digunakan. Tahap kedua, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak (screening), mereduksi jumlah sumber menjadi 214 yang dianggap relevan secara tematik. Tahap ketiga, uji kelayakan (eligibility) melalui pembacaan teks penuh (full-text reading), menghasilkan 89 sumber yang memenuhi semua kriteria inklusi. Tahap keempat,

inklusi final (inclusion), menetapkan 67 sumber sebagai korpus utama analisis setelah melalui penilaian kualitas metodologis dan relevansi teoritis. Setiap keputusan eksklusi pada tahap ketiga dan keempat dicatat beserta alasannya untuk menjaga transparansi proses seleksi.

Analisis terhadap literatur yang terpilih dilakukan menggunakan tiga teknik yang saling melengkapi: (1) thematic coding untuk mengidentifikasi tema-tema dominan dan berulang dalam korpus; (2) comparative analysis untuk membandingkan temuan dan argumen di antara berbagai sumber lintas disiplin dan konteks geografis; serta (3) theoretical mapping untuk memetakan posisi masing-masing sumber dalam kerangka teori peacebuilding transformatif (Lederach; Galtung), religious soft power (Nye), dan civil society (Habermas) yang menjadi landasan kajian ini. Ketiga teknik tersebut diterapkan secara bertahap: thematic coding dilakukan pertama untuk menghasilkan struktur kategori; comparative analysis memperdalam pemahaman melalui kontrasasi argumen; dan theoretical mapping mengkonsolidasikan temuan ke dalam kerangka konseptual integratif yang menjadi kontribusi utama penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif berbasis SLR, pengujian keabsahan data (trustworthiness) merupakan prosedur yang tidak dapat diabaikan untuk menjamin bahwa temuan yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Penelitian ini menerapkan empat prosedur keabsahan yang saling memperkuat, mengacu pada kriteria trustworthiness yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985): kredibilitas (credibility), ketergantungan (dependability), keteralihan (transferability), dan konfirmabilitas (confirmability).

Kredibilitas dijamin melalui dua mekanisme utama. Pertama, penilaian kualitas sumber (quality appraisal) dilakukan menggunakan rubrik terstandar dengan lima dimensi evaluasi kredibilitas sumber, ketepatan metodologi, relevansi teoritis, kemutakhiran data, dan konsistensi internal sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2 di bawah. Setiap sumber dinilai secara independen oleh dua peneliti, dan hanya sumber yang memenuhi ambang batas kualitas minimal pada setidaknya tiga dari lima dimensi yang dimasukkan ke dalam korpus final. Kedua, triangulasi sumber diterapkan dengan memastikan bahwa setiap klaim analitis utama didukung oleh minimal tiga sumber independen dari basis data, bahasa, dan perspektif disiplin yang berbeda sehingga temuan tidak bergantung pada satu sumber tunggal.

Dependability dijamin melalui dokumentasi lengkap protokol penelitian, termasuk pencatatan setiap keputusan eksklusi beserta alasannya, sehingga proses

¹⁵ Egon G Guba and Yvonna S Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," *Handbook of Qualitative Research*. (Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 1994).

penelitian dapat diaudit dan direplikasi oleh peneliti lain. Transferability diperkuat melalui deskripsi konteks yang rinci untuk setiap sumber yang dianalisis, memungkinkan pembaca menilai sejauh mana temuan dapat ditransfer ke konteks organisasi keagamaan lain yang serupa. Confirmability dijamin melalui reflexivity peneliti secara eksplisit mendokumentasikan asumsi-asumsi awal dan potensi bias interpretatif serta melalui member checking dengan melibatkan pakar studi NU dan resolusi konflik dalam proses validasi kerangka kategorisasi tematik yang dihasilkan.¹⁶

Tabel 2. Rubrik Penilaian Kualitas Sumber (Quality Appraisal)

Kode	Dimensi Penilaian	Indikator Verifikasi
QA1	Kredibilitas sumber	Publikasi di jurnal terindeks Scopus/WoS/SINTA 1-2, atau diterbitkan penerbit akademik bereputasi
QA2	Ketepatan metodologi	Metode penelitian asal dinyatakan secara eksplisit dan koheren dengan temuan
QA3	Relevansi teoritis	Sumber secara langsung membahas peacebuilding, resolusi konflik, atau peran NU/Islam moderat
QA4	Kemutakhiran data	Diutamakan publikasi ≤ 2010 untuk sumber empiris; sumber klasik (pre-2000) dipertahankan untuk nilai teori fundamentalnya
QA5	Konsistensi internal	Argumen sumber konsisten antara premis, analisis, dan kesimpulan; bebas dari kontradiksi logis besar

Sumber: Diadaptasi dari *Critical Appraisal Skills Programme/CASP (2022)*

¹⁶ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. 4th Ed (Banten: SAGE Publications, 2018).

HASIL PENELITIAN

Peta Literatur: Distribusi dan Tren Penelitian

Kajian literatur sistematis ini mengidentifikasi 67 sumber yang memenuhi seluruh kriteria inklusi setelah melalui serangkaian tahap penyaringan yang ketat. Dari total 312 catatan yang teridentifikasi melalui pencarian di lima basis data utama Scopus, Google Scholar, JSTOR, Taylor & Francis Online, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ)¹⁷ proses deduplikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian kelayakan teks lengkap menghasilkan 67 sumber final yang digunakan dalam sintesis (lihat Diagram 1: Alur Seleksi PRISMA).

Justifikasi pencapaian saturasi data (data saturation) pada 67 sumber didasarkan pada dua pertimbangan metodologis utama. Pertama, secara tematik, tidak ada tema substantif baru yang muncul setelah inklusi sumber ke-54 sebuah indikator konvergensi yang lazim digunakan dalam penelitian sintesis kualitatif¹⁸ (Thomas & Harden, 2008). Kedua, secara distribusi geografis dan temporal, korpus 67 sumber mencakup kontribusi dari empat kawasan akademik dominan (Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Indonesia) serta rentang waktu 34 tahun (1990–2024), sehingga menjamin heterogenitas perspektif yang memadai untuk menggambarkan diskursus global mengenai peran NU.

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Membahas NU secara eksplisit sebagai aktor/subjek utama	Tidak membahas NU atau hanya menyebut secara marginal
Terkait resolusi konflik, peacebuilding, atau moderasi Islam	Fokus pada organisasi Islam lain tanpa komparasi dengan NU
Diterbitkan dalam rentang 1990–2024	Diterbitkan sebelum 1990 (pra-demokratisasi)
Diterbitkan di jurnal terindeks (Scopus, DOAJ) atau penerbit bereputasi	Tidak melalui proses peer-review atau editorial yang terverifikasi
Tersedia teks lengkap (full text) untuk analisis	Hanya tersedia abstrak atau ringkasan tanpa akses penuh
Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti (2024)

¹⁷ David Moher, "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement," *Open Medicine: A Peer-Reviewed, Independent, Open-Access Journal* 3, no. 2 (2009): 123–30.

¹⁸ James Thomas and Angela Harden, "Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews," *BMC Medical Research Methodology* 8, no. 45 (2017), <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.

Secara temporal, corpus literatur menunjukkan pertumbuhan eksponensial yang signifikan. Dari 67 sumber, hanya 9 (13,4%) diterbitkan sebelum tahun 2000, sementara 41 sumber (61,2%) diterbitkan dalam dekade terakhir (2015–2024). Lonjakan ini berkorelasi dengan dua momentum global: (1) meningkatnya perhatian akademik internasional terhadap fenomena radikalisme Islam pasca-2001 yang mendorong kebutuhan akan kajian mendalam tentang model Islam moderat sebagai counter-narrative; dan (2) menguatnya agenda perdamaian berbasis komunitas (community-based peacebuilding) dalam studi hubungan internasional setelah kegagalan intervensi militer di berbagai konflik. Secara geografis, 58% literatur diproduksi oleh akademisi berbasis di luar Indonesia (terutama Amerika Serikat 22%, Australia 15%, dan Belanda 11%), sedangkan 42% merupakan kontribusi akademisi Indonesia sebuah pola yang mengindikasikan bahwa kajian tentang NU telah melampaui batas-batas akademik domestik dan memperoleh signifikansi internasional yang substansial.

Tabel 4. Distribusi Literatur Berdasarkan Tema, Periode, dan Orientasi Epistemik

Tema Utama	N	Persentase	Periode Dominan	Orientasi Epistemik
NU & Identitas Islam Moderat	18	26,9%	1990–2010	Teologis-Normatif
NU & Resolusi Konflik Lokal	16	23,9%	2000–2015	Empiris-Deskriptif
NU & Civil Society / Demokrasi	14	20,9%	1998–2020	Politis-Sosiologis
NU & Peacebuilding Global	12	17,9%	2010–2024	Hubungan Internasional
NU & Religious Soft Power	7	10,4%	2015–2024	Teoritis-Konseptual
Total	67	100%		

Sumber: Hasil analisis bibliometrik peneliti terhadap 67 sumber terinklusi (2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa tema 'NU & Identitas Islam Moderat' mendominasi korpus (18 sumber, 26,9%), terutama pada periode 1990–2010, dan bersifat teologis-normatif mencerminkan kajian awal yang lebih berfokus pada deskripsi doktrin. Sebaliknya, tema-tema yang muncul pada periode lebih baru seperti 'NU & Peacebuilding Global' (12 sumber, 2010–2024) dan 'NU & Religious Soft Power' (7 sumber, 2015–2024) cenderung bersifat teoritis-konseptual dan memiliki orientasi hubungan internasional—suatu pergeseran epistemik yang mengindikasikan bahwa diskursus akademik tentang NU telah bertransformasi

dari kajian keagamaan deskriptif menuju analisis aktor global yang lebih analitis dan kritis.

Wasatiyyah sebagai Fondasi Ideologis Resolusi Konflik

Temuan pertama dan paling fundamental dari kajian ini adalah teridentifikasinya mekanisme operasionalisasi nilai wasatiyyah dalam praktik-praktik konkret resolusi konflik NU. Sebanyak 31 dari 67 sumber (46,3%) secara eksplisit mengidentifikasi prinsip-prinsip ahlussunnah wal jama'ah khususnya tawassuth (jalan tengah), i'tidal (keadilan), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan) sebagai basis nilai yang memungkinkan NU berperan sebagai mediator yang dipercaya oleh berbagai pihak yang berkonflik.¹⁹ Penting untuk dicatat bahwa temuan ini bukan sekadar mendokumentasikan dimensi normatif-doktrinal dari wasatiyyah, melainkan mengidentifikasi jalur kausal (causal pathway) dari nilai teologis menuju kapasitas mediasi praktis.

Jalur kausal tersebut bekerja melalui dua mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, mekanisme *trust-building* historis: konsistensi NU selama hampir satu abad dalam menolak eksklusivisme keagamaan yang paling monumental tercermin dalam dukungan NU terhadap Pancasila sebagai dasar negara sejak 1945 telah membangun reputasi institusional sebagai aktor yang dapat diandalkan oleh kelompok-kelompok berbeda.²⁰ Fealy dan Barton (1996) menyebut komitmen ini sebagai fondasi bagi apa yang mereka istilahkan sebagai 'trustworthy neutrality', yakni posisi yang memungkinkan NU diterima sebagai pihak ketiga dalam situasi konflik tanpa mengorbankan integritas keanggotaannya. Kedua, mekanisme sosialisasi sistematis: jaringan pesantren NU yang mencakup lebih dari 28.000 lembaga di seluruh Indonesia berfungsi, sebagaimana didokumentasikan Van Bruinessen (1994) dan Bush (2009),²¹ sebagai infrastruktur sosialisasi nilai-nilai moderasi yang berlangsung lintas generasi secara berkesinambungan.²²

Dimensi yang sering diabaikan dalam kajian tentang wasatiyyah NU adalah sifatnya yang tidak monolitik. Analisis terhadap 31 sumber yang relevan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut bervariasi secara signifikan berdasarkan konteks baik konteks konflik (etnis, agama, atau sosial-

¹⁹ Greg Fealy and Greg Barton, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia* (Clayton: Monash Asia Institute, 1996).

²⁰ R W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Practical Guides in Psychiatry (Princeton University Press, 2000), <https://books.google.co.id/books?id=tc6AcVGgLsEC>.

²¹ Bush, *Nahdlatul Ulama and the Search for a Modern Islamic Civilization*.

²² Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Dan Pencarian Wacana Baru*, ed. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1994).

ekonomi), level aktor NU yang terlibat (nasional versus lokal), maupun periode historis. Dalam konflik yang memiliki dimensi teologis, misalnya, tasamuh (toleransi) cenderung menjadi nilai yang ditonjolkan; sementara dalam konflik yang didorong oleh ketimpangan ekonomi, tawazun (keseimbangan) lebih dioperasionalkan sebagai prinsip panduan. Fleksibilitas aplikatif ini bukan rigiditas doktrin yang menjadikan wasatiyyah sebagai sumber daya nilai yang adaptif dan berkelanjutan dalam konteks yang beragam.

NU sebagai Mediator dan Fasilitator Konflik Lokal

Temuan pertama dan paling fundamental dari kajian ini adalah teridentifikasinya mekanisme operasionalisasi nilai wasatiyyah dalam praktik-praktik konkret resolusi konflik NU. Sebanyak 31 dari 67 sumber (46,3%) secara eksplisit mengidentifikasi prinsip-prinsip ahlussunnah wal jama'ah khususnya tawassuth (jalan tengah), i'tidal (keadilan), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan) sebagai basis nilai yang memungkinkan NU berperan sebagai mediator yang dipercaya oleh berbagai pihak yang berkonflik. Penting untuk dicatat bahwa temuan ini bukan sekadar mendokumentasikan dimensi normatif-doktrinal dari wasatiyyah, melainkan mengidentifikasi jalur kausal (causal pathway) dari nilai teologis menuju kapasitas mediasi praktis.

Jalur kausal tersebut bekerja melalui dua mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, mekanisme *trust-building* historis: konsistensi NU selama hampir satu abad dalam menolak eksklusivisme keagamaan yang paling monumental tercermin dalam dukungan NU terhadap Pancasila sebagai dasar negara sejak 1945 telah membangun reputasi institusional sebagai aktor yang dapat diandalkan oleh kelompok-kelompok berbeda. Fealy dan Barton (1996) menyebut komitmen ini sebagai fondasi bagi apa yang mereka istilahkan sebagai 'trustworthy neutrality', yakni posisi yang memungkinkan NU diterima sebagai pihak ketiga dalam situasi konflik tanpa mengorbankan integritas keanggotaannya. Kedua, mekanisme sosialisasi sistematis: jaringan pesantren NU yang mencakup lebih dari 28.000 lembaga di seluruh Indonesia berfungsi, sebagaimana didokumentasikan Van Bruinessen (1994) dan Bush (2009), sebagai infrastruktur sosialisasi nilai-nilai moderasi yang berlangsung lintas generasi secara berkesinambungan.

Dimensi yang sering diabaikan dalam kajian tentang wasatiyyah NU adalah sifatnya yang tidak monolitik. Analisis terhadap 31 sumber yang relevan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut bervariasi secara signifikan berdasarkan konteks baik konteks konflik (etnis, agama, atau sosial-ekonomi), level aktor NU yang terlibat (nasional versus lokal), maupun periode historis. Dalam konflik yang memiliki dimensi teologis, misalnya, tasamuh (toleransi) cenderung menjadi nilai yang ditonjolkan; sementara dalam konflik

yang didorong oleh ketimpangan ekonomi, tawazun (keseimbangan) lebih dioperasionalkan sebagai prinsip panduan. Fleksibilitas aplikatif ini bukan rigiditas doktrin yang menjadikan wasatiyyah sebagai sumber daya nilai yang adaptif dan berkelanjutan dalam konteks yang beragam.

NU sebagai Aktor *Peacebuilding Global*

Temuan ketiga yang secara analitis paling novel dan paling berkontribusi pada pengembangan teori adalah terdokumentasinya transformasi NU dari aktor domestik menjadi aktor *peacebuilding global* yang diakui secara internasional. Dua belas sumber yang berfokus pada periode 2010–2024 secara konsisten mendokumentasikan ekspansi jangkauan geografis dan peningkatan pengaruh struktural NU dalam tata kelola perdamaian global.

Pada level diplomasi bilateral dan multilateral, Mietzner (2009)²³ mencatat keterlibatan aktif tokoh-tokoh NU dalam forum-forum dialog antaragama internasional yang mencakup pertemuan dengan hierarki Vatikan, pemimpin komunitas Yahudi global, dan jaringan organisasi perdamaian internasional. Lebih dari sekadar kehadiran seremonial, keterlibatan ini dalam penafsiran literatur yang lebih baru merupakan bagian dari strategi deliberatif yang disadari: membangun koalisi normatif global yang mendukung narasi Islam moderat sebagai *mainstream* Islam, alih-alih menjadikan Islam radikal sebagai referensi dominan.

Lebih konkret lagi, inisiatif *International Summit of Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL) yang digagas NU telah berhasil mengkonsolidasikan jaringan ulama moderat dari lebih dari 70 negara. Dalam terminologi Haas (1992)²⁴, capaian ini menjadikan NU sebagai *epistemic community* yakni jaringan profesional yang memiliki otoritas pengetahuan yang diakui dan berkapasitas untuk mempengaruhi kebijakan internasional melalui wacana normatif. Transformasi ini secara signifikan melampaui peran tradisional NU sebagai organisasi keagamaan nasional dan membuka ruang teoritis baru dalam kajian aktor non-negara dalam hubungan internasional.

***Religious Soft Power* NU dalam Perspektif Hubungan Internasional**

Tujuh sumber yang secara spesifik mengkaji dimensi *religious soft power* NU mengungkap arsitektur pengaruh internasional yang beroperasi melalui tiga saluran yang saling melengkapi. Pertama, saluran wacana (*discursive channel*): NU secara aktif memproduksi dan mendiseminasikan narasi Islam yang

²³ Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*.

²⁴ Ernst B. Haas, "Knowledge, Power, and International Policy Coordination," *International Organization* 46, no. 1 (1992): 1–35, <https://doi.org/10.1017/S002081830000105X>.

kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian sebuah counter-narrative yang strategis terhadap dominasi narasi jihadis-radikal dalam representasi global Islam pasca-2001 (Fealy, 2004)²⁵. Kedua, saluran institusional (institutional channel): jaringan pesantren, universitas Islam (terutama UIN dan IAIN yang memiliki afiliasi kuat dengan jaringan alumni NU), serta lembaga-lembaga terkait NU berfungsi sebagai platform diplomasi kebudayaan yang secara konsisten menarik perhatian dan kunjungan akademisi serta pemimpin agama dari seluruh dunia. Ketiga, saluran personal (personal channel): tokoh-tokoh NU paling ikonik adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah menjadi simbol Islam moderat yang diakui secara internasional, memproyeksikan soft power NU jauh melampaui batas-batas administratif Indonesia.

Yang perlu ditekankan secara analitis adalah sifat *autonomous* dari soft power ini: berbeda dengan soft power yang dikonseptualisasikan Nye (2004)²⁶ sebagai instrumen kebijakan luar negeri negara, pengaruh internasional NU beroperasi secara mandiri dari dan terkadang dalam ketegangan dengan kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Otonomi ini merupakan sumber kekuatan sekaligus sumber kerentanan: di satu sisi, ia membuat NU lebih kredibel di mata komunitas internasional yang skeptis terhadap propaganda negara; di sisi lain, ia membatasi kapasitas NU untuk mengakses sumber daya institusional dan dukungan diplomatik yang hanya dapat dimobilisasi oleh negara.

PEMBAHASAN

NU dalam Kerangka *Peacebuilding Theory*: Melampaui Paradigma Liberal

Sintesis temuan-temuan di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan yang secara insidental terlibat dalam proses perdamaian, melainkan merupakan aktor *peacebuilding* yang secara struktural dan sistematis beroperasi di berbagai level sekaligus. Menggunakan taksonomi Lederach (1997)²⁷ yang membagi aktor *peacebuilding* ke dalam tiga level top leadership (Level 1), middle-range leadership (Level 2), dan grassroots leadership (Level 3) temuan kajian ini mengindikasikan bahwa NU adalah salah satu dari sangat sedikit organisasi di dunia yang mampu beroperasi secara simultan dan konsisten di ketiga level tersebut. Pada Level 1, tokoh-tokoh puncak NU terlibat dalam negosiasi dan dialog di tingkat nasional hingga forum-forum internasional seperti ISOMIL. Pada Level 2, kiai dan intelektual NU memfasilitasi dialog lintas komunitas dan membangun jembatan antar-kelompok yang terfragmentasi. Pada

²⁵ Fealy and Barton, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, 1996.

²⁶ Nye, *Soft Power: The Means To Success In World Politics*.

²⁷ Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

Level 3, jaringan pesantren dan ranting NU di tingkat desa menjadi infrastruktur perdamaian yang hidup, berakar, dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kemampuan beroperasi secara vertikal di ketiga level ini merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) NU yang membedakannya dari mayoritas aktor *peacebuilding* lainnya baik organisasi keagamaan internasional, lembaga bantuan asing, maupun organisasi non-pemerintah sekuler yang umumnya hanya efektif pada satu atau dua level. Interpretasi ini sejalan dengan sekaligus memperluas argumen Mac Ginty dan Richmond (2013)²⁸ tentang pentingnya 'local ownership' dalam *peacebuilding*: NU bukan hanya memiliki local ownership di tingkat komunitas, tetapi mampu mengartikulasikan kepentingan perdamaian lokal tersebut ke dalam bahasa dan forum-forum global.

Dari perspektif kritis, temuan kajian ini secara langsung menantang dominasi paradigma liberal dalam studi *peacebuilding* yang mengasumsikan bahwa perdamaian harus dibangun dari atas ke bawah (*top-down*) melalui institusi-institusi formal yang didukung oleh komunitas internasional. Pengalaman NU menunjukkan bahwa *peacebuilding* yang berkelanjutan justru memerlukan kekuatan akar rumput yang kuat dan legitimasi moral yang dibangun melalui konsistensi historis jangka panjang sebuah argumentasi yang secara konseptual resonan dengan kritik Richmond (2011) terhadap 'liberal peace' dan tawarannya tentang 'hybrid peace' sebagai alternatif. Namun kajian ini melampaui Richmond dengan menunjukkan bahwa 'hibriditas' yang dimaksud bukanlah kompromi antara nilai universal dan lokal, melainkan sebuah kapasitas untuk mengartikulasikan nilai-nilai lokal (*wasatiyyah*, tradisi pesantren, kearifan kiai) ke dalam bahasa dan arena global tanpa mengkomprominya.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu mengungkap sebuah kesenjangan konseptual yang penting. Sebagian besar kajian tentang *peacebuilding* berbasis agama mulai dari Appleby (2000)²⁹ tentang '*ambivalence of the sacred*' tentang *peacebuilding* berbasis agama Abrahamik cenderung memosisikan agama sebagai motivasi atau legitimasi untuk perdamaian, bukan sebagai infrastruktur institusional perdamaian itu sendiri. Kontribusi konseptual kajian ini adalah menegaskan bahwa dalam kasus NU, jaringan pesantren dan lembaga-lembaganya bukan sekadar menyediakan motivasi atau narasi perdamaian, tetapi secara literal merupakan infrastruktur tempat fisik, jaringan

²⁸ Roger Mac Ginty and Oliver Richmond, "The Local Turn in Peace Building: A Critical Agenda for Peace," *Third World Quarterly* 34, no. 5 (2013): 763-783, <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.800750>.

²⁹ Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*.

komunikasi, sumber daya manusia, dan modal kepercayaan yang memungkinkan proses perdamaian berlangsung secara operasional.

Autonomous Religious Soft Power dan Implikasi bagi Studi Hubungan Internasional

Implikasi teoritis terpenting dari kajian ini berkaitan dengan konsep 'autonomous religious soft power' yang diformulasikan berdasarkan analisis terhadap pengaruh internasional NU. Konsep ini merupakan koreksi dan perluasan atas formulasi Nye (2004) yang memahami soft power sebagai instrumen kebijakan luar negeri negara. Dalam kasus NU, pengaruh internasional yang substansial berhasil diproyeksikan tanpa bahkan terkadang di tengah ketegangan dengan dukungan aparatur negara yang sistematis. Ini bukan anomali, melainkan sebuah pola yang dapat dipahami secara teoritis: otoritas moral aktor keagamaan non-negara justru seringkali tumbuh dari independensinya terhadap kepentingan negara, dan inkonsistensi dengan posisi pemerintah dapat dipandang sebagai bukti keaslian (authenticity) yang meningkatkan kredibilitas di mata komunitas internasional.

Implikasi bagi studi hubungan internasional setidaknya mencakup tiga dimensi. Pertama, secara ontologis, kajian ini menambah evidensi empiris bagi argumen Keohane dan Nye (1977)³⁰ tentang *complex interdependence* bahwa aktor non-negara mampu memainkan peran struktural dalam tata kelola global yang tidak dapat direduksi ke dalam kalkulasi kepentingan negara-bangsa. Kedua, secara epistemologis, kasus NU menunjukkan bahwa studi soft power memerlukan perluasan unit analisis dari negara ke aktor non-negara, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki jaringan transnasional dan otoritas simbolik yang mandiri. Ketiga, secara normatif, transformasi NU menjadi epistemic community Islam moderat global memiliki implikasi praktis bagi formulasi kebijakan: investasi pada penguatan organisasi masyarakat sipil berbasis agama yang moderat dapat menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang lebih efektif dan berbiaya rendah dibandingkan intervensi militer atau diplomasi formal dalam konteks pencegahan radikalisme.

Dari perspektif perbandingan, model NU berbeda secara fundamental dari organisasi Islam transnasional lainnya seperti Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood). Sementara yang terakhir beroperasi terutama melalui jaringan politik dan seringkali dalam oposisi terhadap negara-negara Arab yang ada, NU membangun pengaruhnya melalui otoritas moral, jaringan pendidikan, dan posisi moderat yang inklusif. Perbedaan strategi ini menghasilkan perbedaan outcome

³⁰ R O Keohane and J S Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Little, Brown, 1977), <https://books.google.co.id/books?id=RmvuAAAAMAAJ>.

yang signifikan: NU memperoleh kepercayaan dari aktor-aktor lintas agama dan lintas ideologi, sementara organisasi dengan orientasi politik lebih sering dipandang dengan kecurigaan oleh pihak-pihak yang tidak berbagi orientasi ideologis mereka. Ini adalah pelajaran empiris yang memiliki relevansi langsung bagi desain kebijakan peacebuilding berbasis agama.

Sebagai penutup, kajian ini perlu mengakui keterbatasannya secara transparan. Pertama, dominasi literatur kualitatif-deskriptif membatasi kemampuan kajian ini untuk menyajikan analisis kuantitatif tentang dampak terukur intervensi NU. Kedua, potensi publication bias di mana narasi keberhasilan lebih banyak dipublikasikan daripada kegagalan dapat menghasilkan gambaran yang lebih optimistis dari realitas empiris yang sesungguhnya. Ketiga, konsentrasi geografis literatur di Jawa mungkin tidak merepresentasikan secara memadai keragaman NU di luar Jawa yang memiliki karakteristik kontekstual yang berbeda. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka agenda penelitian ke depan: studi longitudinal dengan desain mixed-methods yang mengukur dampak program peacebuilding NU secara kuantitatif; penelitian komparatif NU dengan organisasi Islam moderat di Maroko, Tunisia, dan Malaysia; serta kajian khusus tentang peran perempuan dalam jaringan peacebuilding NU sebuah dimensi yang masih secara nyata kurang terwakili dalam literatur yang ada.

SIMPULAN

Kajian literatur sistematis ini berhasil mengidentifikasi dan mensintesis empat tema utama yang mencirikan peran Nahdlatul Ulama sebagai aktor keagamaan dalam resolusi konflik sosial dari perspektif perdamaian global: (1) *wasatiyyah* sebagai fondasi ideologis yang operasional; (2) mediasi multi-level dalam konflik lokal Indonesia; (3) transformasi menuju aktor *peacebuilding* global; dan (4) proyeksi *religious soft power* dalam hubungan internasional. Secara teoritis, pengalaman NU menantang sejumlah asumsi dominan dalam studi *peacebuilding* dan hubungan internasional—khususnya paradigma liberal yang berorientasi *top-down*—sekaligus menawarkan konsep baru *autonomous religious soft power* dan model *civil society* berbasis agama yang integratif sebagai kontribusi terhadap khazanah teoritis bidang tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perdamaian global di abad ke-21 tidak dapat mengabaikan peran organisasi keagamaan moderat seperti NU, yang telah berkembang jauh melampaui batas aktor domestik dan menjadi kontributor substantif dalam arsitektur perdamaian dunia yang semakin kompleks. Namun demikian, kajian ini perlu mengakui sejumlah keterbatasan secara transparan sebagai bentuk refleksi metodologis. Pertama, dominasi literatur kualitatif-deskriptif dalam korpus yang dianalisis membatasi kemampuan kajian ini untuk

menyajikan asesmen kuantitatif atas dampak terukur dari intervensi-intervensi konkret NU di lapangan. Kedua, potensi *publication bias*—di mana narasi keberhasilan cenderung lebih banyak dipublikasikan dibandingkan kegagalan—dapat menghasilkan gambaran yang lebih optimistis dari realitas empiris yang sesungguhnya, sehingga temuan kajian ini perlu dibaca dengan kehati-hatian kritis. Ketiga, konsentrasi geografis literatur pada konteks Jawa berpotensi tidak merepresentasikan secara memadai keragaman NU di luar Jawa, yang memiliki karakteristik kontekstual, budaya, dan tantangan konflik yang berbeda secara signifikan. Atas dasar keterbatasan-keterbatasan tersebut, sejumlah agenda penelitian ke depan (*future research*) menjadi mendesak untuk dikembangkan: (1) studi longitudinal dengan desain *mixed-methods* yang mengukur dampak program *peacebuilding* NU secara kuantitatif dan komparatif; (2) penelitian komparatif antara NU dan organisasi Islam moderat di konteks berbeda, seperti Maroko, Tunisia, dan Malaysia, guna menguji transferabilitas model NU ke lintas konteks; serta (3) kajian khusus yang memusatkan perhatian pada peran perempuan dalam jaringan *peacebuilding* NU dimensi yang hingga kini masih secara nyata kurang terwakili dalam literatur yang ada, padahal secara empiris memiliki signifikansi yang substansial. Implikasi praktis dari temuan ini sangat relevan bagi para pembuat kebijakan, praktisi perdamaian, dan komunitas akademik: investasi sistematis dalam mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengadaptasi model NU ke dalam berbagai konteks global berpotensi memberikan kontribusi nyata pada upaya membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, dan inklusif—sebuah tatanan yang tidak hanya bertumpu pada institusi-institusi formal internasional, tetapi juga pada kekuatan moral dan sosial dari komunitas-komunitas agama yang berkomitmen pada nilai-nilai perdamaian.

Daftar Pustaka

- Appleby, S R. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict Series: Religion, Intenartional Studies. Bloomsbury Academic, 2000.
<https://books.google.co.id/books?id=8RqbMGvsz5MC>.
- Bruinessen, Martin Van. *NU : Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Dan Pencarian Wacana Baru*. Edited by Farid Wajidi. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1994.
- Bush, Robin. *Nahdlatul Ulama and the Search for a Modern Islamic Civilization*. Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2009.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edited by 4th Ed. Banten: SAGE Publications, 2018.
- David Moher. "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement." *Open Medicine: A Peer-Reviewed*,

- Independent, Open-Access Journal* 3, no. 2 (2009): 123–30.
- Fealy, G, and G Barton. *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Monash Papers on Southeast Asia. Monash Asia Institute, 1996. <https://books.google.co.id/books?id=eYSOAAAAMAAJ>.
- Fealy, Greg, and Greg Barton. *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute, 1996.
- Fink, Arlene. *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. 5th ed. SAGE Publications, 2019.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (September 1, 1969): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Ginty, Roger Mac, and Oliver Richmond. "The Local Turn in Peace Building: A Critical Agenda for Peace," *Third World Quarterly* 34, no. 5 (2013): 763–783. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.800750>.
- Guba, Egon G, and Yvonna S Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research." *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 1994.
- Haas, Ernst B. "Knowledge, Power, and International Policy Coordination," *International Organization* 46, no. 1 (1992): 1–35. <https://doi.org/10.1017/S002081830000105X>.
- Hefner, R W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Practical Guides in Psychiatry. Princeton University Press, 2000. <https://books.google.co.id/books?id=tc6AcVGgLsEC>.
- Helmick, R G, and R Petersen. *Forgiveness & Reconciliation: Public Policy & Conflict Transformation*. Templeton Press, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=EtoQAQAIAAJ>.
- Johnston, D, and C Sampson. *Religion, the Missing Dimension of Statecraft*. Oxford University Press, 1995. <https://books.google.co.id/books?id=o7TAsFMSgEMC>.
- Keohane, R O, and J S Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown, 1977. <https://books.google.co.id/books?id=RmvuAAAAMAAJ>.
- Lederach, J P. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. United States Institute of Peace Press, 1997. <https://books.google.co.id/books?id=54G6tlumdT0C>.
- Mietzner, M. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Book Collections on Project MUSE. Institute of Southeast Asian Studies, 2009. https://books.google.co.id/books?id=_88w9S28ZkUC.
- Moher, David, Alessandro Liberati, Jennifer Tetzlaff, and Douglas Altman.

- “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses: The PRISMA Statement.” *Open Medicine: A Peer-Reviewed, Independent, Open-Access Journal* 3, no. 2 (July 21, 2009): 123–30. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005>.
- Nye, J S. *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=hTBxIMnpMloC>.
- Petticrew, M, and H Roberts. *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Wiley, 2008. https://books.google.co.id/books?id=ZwZ1_xU3E80C.
- Philpott, Daniel. “Explaining the Political Ambivalence of Religion.” *The American Political Science Review* 101, no. 3 (March 31, 2007): 505–25. <http://www.jstor.org/stable/27644463>.
- Sholeh, Badrus. “Resolusi Konflik Di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia.” *IAIN Tulungagung Research Collections* 12, no. 1 (2017): 29–52.
- Thomas, James, and Angela Harden. “Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews,” *BMC Medical Research Methodology* 8, no. 45 (2017). <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.
- Triguswinri, Krisnaldo. “Diskursus Ruang Publik Habermasian Dan Kebijakan Publik: Studi Literatur.” *Pembangunan Dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro* 7, no. 1 (2023): 637–42.